

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang digunakan peneliti sebagai acuan serta referensi untuk memperoleh bahan pembandingan. Dengan adanya penelitian terdahulu ini diharapkan penelitian terhindar dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Optimalisasi Dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik / Taudlikhul Afkar ,Ulfa Puspa Wanti Widodo, Suharyanto, Tony Susilo Wibowo 2020	Optimalisasi . Peningkatan Pengelolaan Keuangan BUMDes	Hasil penelitian ini adalah diharapkan BUMDes Banjarsari melakukan pengoptimalan dalam hal pengelolaan keuangan sehingga pendapatan usaha dapat maksimal.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai optimalisasi dalam peningkatan pengelolaan keuangan BUMDes, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.
2.	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec .Ponggok Kab	Transparansi , Pengelolaan Keuangan BUMDes , PAD	Hasil dari penelitian tersebut adalah laporan keuangan yang dikelola BUMDes tersebut sudah bersifat transparansi dalam melaporkan pertambahan asetnya	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai pelaporan aset desa, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.

	Blitar) / Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti 2017		dan sesuai dengan buku pedoman yang ada	
3.	Implmentasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang) / Nailly Rofidah , Sulis Rochayatun 2020	Implementasi ,Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes.	Hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan keuangan masih bersifat sederhana dan perlu adanya pengawasan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai laporan keuangan BUUMDes, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.
4.	Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi / Mukhzarudfa, Wirmie Eka Putra, Afrizal, Susfayetti, Yuliusman 2020	Perencanaan , Pengelolaan Keuangan BUMDes	Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam penyusunan pengelolaan dan perencanaan keuangan BUMDes diharapkan bisa lebih baik dan spesifik. Dan lebih memerhatikan perencanaan kas da piutang sesuai dengan standart yang sudah ditentukan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya dilaksanakan di BUMDes Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.
5.	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni Di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara / Sahala Purba, Arison Nainggolan, Alfanita Gratia Telaumbanua 2021	Akuntanbilita s , Pengelolaan Keuangan BUMDes	Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pengelolaan keuangannya terbilang banyak kekurangan dan belum teratur dengan pengelolaan keuangan BUMDes dan untuk lainnya seperti pengendalian internal dan lain-lain sudah sesuai dengan www.layananbimtek.com .	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai akuntanbilitas pengelolaan keuangan BUMDes, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.
6.	The Analysis Of Putukrejo Village Government Readiness In Forming BUMDES	Analysis Readiness In Forming BUMDES As A	The results of the study confirms that the Putukrejo Village Government has a	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai analisis pembangunan BUMDes

	<p>As A Development Effort Of Rural Communities Based On Creative Economy Agung Minto Wahyu ,Ega Aditya , Navilah Laila Wardani , Jeni Susyanti 2019</p>	<p>Development Effor</p>	<p>fairly good readiness in forming BUMDes. It is proven by the development of business units that are very helpful in empowering local rural communities. In addition, BUMDes “Barokah” also seeks to empower the community based on creative economy by establishing the tourist attraction, Sumber Sira Market, which is used to manage the products of the community creativity</p>	<p>pengelolaan keuangan BUMDes, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes.</p>
--	---	--------------------------	---	---

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Stewardship

Teori yang digunakan adalah salah satu bagian dari teori agensi yaitu stewardship theory. Stewardship theory mendeskripsikan mengenai kondisi dimana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya. Teori ini menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya , menampung aspirasi masyarakat , memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan dan

mampu untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat secara maksimal.

2.2.2 Akuntansi Sektor Publik

2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2015) akuntansi sektor publik adalah alat komunikasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Adapun perbedaan dari berbagai hal mengenai akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Faktor yang membedakan keduanya adalah dikarenakan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk lebih tepatnya (Bastian, 2014) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah ,ekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga – lembaga tinggi negara dan departemen – departemen dibawahnya ,pemerintah daerah , BUMN , BUMD ,LSM dan yayasan sosial maupun proyek – proyek kerjasam sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut (Kusufi, 2018) bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian , pengukuran , pencatatan , dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah , LSM ,dan lain – lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan ,

pengklasifikasian , penganalisan , dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2.2.2.2 Jenis – Jenis Akuntansi Sektor Publik

Organisasi – organisasi sektor publik banyak dijumpai dalam kehidupan sehari – hari. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan dan pendidikan terdapat berbagai organisasi sektor publik seperti, universitas , sekolah , rumah sakit , puskesmas , dan balai kesehatan lainnya. (Biduri, 2018) mengatakan bahwa secara garis besar jenis – jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah juga merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang berbentuk seperti:

- a. Pemerintah Pusat , yang termasuk didalamnya adalah : Kementrian (Departemen Dalam Negeri , Departemen Sosial , Departemen Keuangan , dan lain lain), Lembaga dan Badan Negara seperti KPU , KPK , dan lain- lain.
- b. Pemerintah Daerah , yang termasuk didalamnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas

Pendidikan , Dinas Kesehatan , Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah , dan lain-lain).

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Contoh dari organisasi nirlaba milik pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM , RS Daerah , dan yayasan – yayasan milik pemerintah.

3. Organisasi Nirlaba Swasta

Organisasi nirlaba swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dikelola oleh pihak swasta. Seperti yayasan (Sampoerna Foundation , Dompot Dhuafa Republika dan lain – lain), sekolah dan universitas swasta , rumah sakit milik swasta.

2.2.2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki perbedaan yaitu pada sifat dan karakteristiknya yang dipengaruhi adanya perbedaan lingkungan. Menurut (Biduri, 2018) komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik :

1. Faktor ekonomi meliputi :
 - a. Pertumbuhan ekonomi
 - b. Tingkat inflasi
 - c. Tenaga kerja
 - d. Nilai tukar mata uang

- e. Infrastruktur
 - f. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
2. Faktor politik meliputi :
- a. Hubungan negara dan masyarakat
 - b. Legitimasi pemerintah
 - c. Ideologi negara
 - d. Elit politik dan massa
 - e. Jaringan internasional
 - f. Kelembagaan
3. Faktor kultural meliputi :
- a. Keragaman suku ,ras,agama,bahasa dan budaya
 - b. Sistem nilai dimasyarakat
 - c. Historis
 - d. Sosiologi masyarakat
 - e. Karakteristik masyarakat
 - f. Tingkat pendidikan
4. Faktor demografi meliputi :
- a. Pertumbuhan penduduk
 - b. Struktur usia
 - c. Migrasi
 - d. Tingkat kesehatan

2.2.2.4 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Siklus akuntansi sektor publik menurut (Bastian, 2014) adalah :

1. Transaksi , persetujuan jual beli antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Transaksi – transaksi ini nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan.
2. Analisis bukti transaksi , dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti transaksi yang berisi informasi mengenai kegiatan transaksi yang dilakukan. Bukti transaksi ini yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
3. Pencatatan data transaksi , dari hasil analisis bukti transaksi selanjutnya akan dilaksanakan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh pihak yang bertugas dalam sebuah jurnal.
4. Pengikhtisaran , dalam buku besar terdapat beberapa nama kelompok akun yang terdapat pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada catatan atas transaksi tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan nama masing – masing dan biasanya disebut juga posting.
5. Pelaporan , dalam satu periode akuntansi transaksi yang telah dicatat dan dikelompokkan dalam buku besar setelah itu akan dibuatkan laporan keuangan yang akan disampaikan pada

pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun akan dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa

2.2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha , memanfaatkan aset ,menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya guna mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersumber daya dari desa ke pasar.

Pedoman terbaru tentang BUMDes yang dikeluarkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan ,dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Berdasarkan pedoman tersebut Bdan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa hal yang ini memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. (Gusnardi, 2019)

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga komersial lainnya yaitu :

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
2. Sumber modal usaha (51%) dari desa dan (49%) dari masyarakat melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasi menggunakan falsafah bisnis yang berasal dari budaya lokal (local wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh Pemerintah ,Pemprov,Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalnya dikontrol oleh (Pemdes , BPD , anggota). (Gusnardi, 2019)

Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai perencanaan dan pendiriannya BUMDes dibentuk atas inisiatif masyarakat ,serta didasarkan prinsip-prinsip dan manfaat kooperatif yang bertanggungjawab. Dan diharapkan dengan adanya

pendirian BUMDes pengelola dapat mengelola BUMDes secara profesional dan mandiri.

2.2.3.2 Landasan Hukum BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1 “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005
Pasal 78
 - (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. (Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005)

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pinjaman ;dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang –kurangnya memuat:
 - a. Bentuk Badan Hukum;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan Kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusandan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

Tujuan didirikan BUMDes oleh pemerintah adalah guna meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam

menyelenggarakan program desa. Ada empat tujuan utama didirikannya BUMDes yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan desa.
4. Menjadi penompang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Adapun tujuan didirikannya BUMDes menurut Pasal 3 Permendesa (Indonesia, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomer 4 Tahun 2015 tentang BUMDES, 2015) yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya mengelola potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
5. Membuka dan menciptakan peluang jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum dan pertumbuhan desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa / BUMDes merupakan gambaran dari perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustanabel. Dalam upaya pengelolaan badan usaha harus dilaksanakan dengan serius guna berjalan secara efektif, efisien dan mandiri. Guna mencapai tujuan BUMDes perlu dilakukannya pemenuhan kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Secara umum pendirian BUMDes ditujukan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar terwujudnya perkembangan usaha masyarakat desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah dengan usaha yang produktif untuk memberantas pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan PADesa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes diharapkan mampu memenuhi Standart Pelayanan Minimal / SPM yang dilaksanakan dalam bentuk perlindungan atau intrvensi yang merugikan dari berbagai pihak. Pemerintah desa juga ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai hukum yang berpijak pada aturan perundang – undangan yang berlaku dimasyarakat desa.

2.2.3.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dijelaskan agar mudah dimengerti ,dengan cara yang sama oleh pemerintah desa ,anggota , BPD, PEMKAB , dan tentunya masyarakat umum. Menurut Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007 pendirian dan pengelolaan BUMDes (2007 : 13) terdapat enam prinsip yaitu :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu bekerjasama guna kelangsungan hidup dan pengembangan usaha.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia berkontribusi secara sukarela untuk mendorong kemajuan usahanya.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes diperlakukan sama rata tanpa memandang gender atau apapun.

4. Transparan

Informasi apapun yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Apapun bentuk kegiatan harus ada pertanggungjawabannya secara teknis ataupun administratif.

6. Sustainabel

Aktivitas usaha harus mampu dikembangkan oleh masyarakat dalam naungan BUMDes.

Dalam proses penguatan ekonomi desa BUMDes diharapkan lebih bisa berkembang dan lebih berday. Hal utama dalam meningkatkan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin silaturahmi disemua kalangan masyarakat desa. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan , pengangguran ,dan membuka akses pasar.

2.2.4 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses persiapan tindakan guna mencapai tujuan. Perencanaan adalah pedoman , garis besar ,

atau arahan yang harus diikuti jika menginginkan hasil yang baik. Secara umum perencanaan adalah proses penentuan tujuan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Handayani-grat perencanaan adalah berbagai proses untuk dapat mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan – kegiatan yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan melalui saran yang tersedia. Adapun menurut Terry perencanaan merupakan suatu pemilihan dan penghubungan realita , menggunakan asumsi – asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menjelaskan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diyakini untuk mencapai suatu hasil.

Berdasarkan pendapat menurut ahli diatas tentang perencanaan , maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah sekumpulan aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan menurut fakta – fakta yang ditemukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Taufiquokhman, 2012)

Syarat – syarat perencanaan yang baik adalah :

1. Logis,masuk akal.
2. Realistik, nyata.
3. Sederhana.
4. Sistematis dan ilmiah.
5. Objektif .

6. Fleksibel.
7. Efektif dan efisien.

Faktor – faktor yang menjadi dasar perencanaan yang baik :

1. Sumberdaya alam , manusia , teknologi , dan modal
2. Idiologi dan falsafah.
3. Sasaran dari tujuan.
4. Dasar dan kebijakan.
5. Data dan metode.
6. Kondisi lingkungan sosial , budaya dan politik.

Arti perencanaan diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan memuat beberapa aspek yaitu:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dengan alteratif yang dipakai.
3. Langkah – langkah yang akan digunakan dalam mencapai tujuan bersama.

Tujuan perencanaan menurut Sarinta (2019:12) adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan petunjuk agar dapat mengetahui apa yang harus dicapai , dengan siapa kita harus bekerjasama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapi tujuan organisasi.
2. Untuk meminimalisir ketidakpastian.
3. Untuk mengurangi pemborosan.

4. Untuk menentukan tujuan dan standart yang digunakan dalam proses pengontrolan dan pengevaluasian.

Fungsi perencanaan Menurut Sarinta (2019:12) sebuah proses diambilnya keputusan yang berhubungan dengan hasil , dengan memanfaatkan sumberdaya dan sistem komunikasi. Adapun manfaat lain yang bisa diambil antara lain :

1. Dengan perencanaan diharapkan dapat memberikan arahan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan.
2. Dengan perencanaan diharapkan dapat memperkirakan resiko yang akan mungkin dihadapi dimasa yang akan datang.
3. Perencanaan dapat digunakan sebagai standart untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Indikator perencanaan Badan Usaha Milik Desa / BUMDes antara lain :

1. Perencanaan / Planning.
 - a. Penetapan Tujuan

Untuk mencapai tujuan yang ingi dicapai oleh BUMDes maka harus disertai dengan masyarakat yang mendukung untuk meningkatkannya perekonomian desa.

b. Prosedur

Pada dasarnya didalam organisasi harus terdapat prosedur yang jelas dan baik agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

c. Program

Didalam suatu organisasi yang baik harus memiliki suatu program yang baik sehingga hasil program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan program program yang direncanakan harus sesuai dengan potensi dan keadaan lingkungan sekitar desa supaya nantinya program tersebut dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan.

2. Pengorganisasian.

Pengorganisasian sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi karena dapat menentukan kemampuan atau keahlian dalam menempatkan suatu pekerjaan yang telah direncanakan. Di suatu organisasi diperlukan adanya pembagian kerja serta penempatan tugas yang sesuai agar pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

a. Penempatan Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa.

Dalam BUMDes harusnya sudah dilakukakn pembagian tugas atau penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan keahliannya sehingga tidak akan terjadinya

tumpang tindih pekerjaan antar pengurus BUMDes. Dengan adanya pembagian tugas dan fungsi didalam BUMDes akan meningkatkan keberhasilan dan kesuksesan BUMDes kedepannya.

b. Penetapan Wewenang.

Penetapan wewenang didalam BUMDes dapat mengatur pengurus agar melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada tekanan dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Dan juga dengan adanya wewenang ini pengurus dapat melindungi desa dari hal – hal yang dapat mengancam keberlangsungan BUMDes.

3. Penggerakan.

Penggerakan merupakan suatu usaha yang dilakukan anggota agar dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan dan usaha – usaha organisasi. Fungsi penggerakan adalah untuk memberikan saran dan bimbingan agar mampu bekerja secara optimal agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar rencana – rencana yang ditetapkan apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau tidak.

Perencanaan unit usaha BUMDes adalah pedoman yang memuat petunjuk untuk menghasilkan hasil yang baik sesuai

dengan apa yang direncanakan. BUMDeS mampu memperkirakan kemungkinan tujuan yang dapat dicapai prediksi dilihat dari aspek ekonomi ,sosial , maupun politik dan apaun yang berhubungan dengan sumber – sumber yang mempengaruhi tercapinya tujuan. Fungsi perencanaan dalam Badan Usaha Milik Desa ditandai dengan adanya dokumen rencana strategis , adanya visi misi organisasi , adanya formula strategi , dan penyusunan anggaran. Dengan adanya fungsi perencanaan BUMDes dapat memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi

2.2.5 Pengelolaan BUMDes

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain :

1. Setiap akhir periode tahun anggaran , pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan dalam forum musyawarah desa.
2. Setiap laporan pertanggungjawaban memuat hal – hal sebagai berikut :
 - a. Laporan kinerja pengelola selama satu periode tahunan.
 - b. Kinerja usaha yang terkait realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan , indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan yang memuat rencana pembagian laba.
 - d. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

- e. Pertanggungjawaban yang dilakukan guna sebagai evaluasi tahunan perkembangan kedepannya.
- f. Peraturan dan tata tetib pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan AD ART

Usaha – usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes antara lain :

1. Pasar desa.
2. Transportasi.
3. Home industri.
4. Pertanian
5. Perikanan darat.
6. Simpan pinjam.
7. Kerajinan rakyat.
8. Objek wisata desa
9. Peternakan dan lain sebagainya.

BUMDes dapat berfungsi sebagai wadah berbagai usaha yang dapat dikembangkan di dalam desa. Dan bisa kita lihat diberbagai BUMDes terdapat usaha yang berbeda – beda. Unit usaha yang berbeda didalam BUMDes dapat dikategoriakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Usaha jasa keuangan , sebagai contoh unit usaha simpan pinjam.

2. Usaha sektor riil/ekonomi , sebagai contoh unit usaha pertokoan atau waserda, fotocopy , pengelolaan tan wisata desa , pertanian , peternakan , dan lain – lain.

2.2.6 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik dapat mempengaruhi perkembangan usaha yang ada. Dengan ini pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara transparan , akuntabel , dan efektif dalam menerapkan prinsip – prinsip yang mempengaruhi perkembangan usaha BUMDes.

2.2.7. Konsep Kinerja Badan Usaha Milik Desa / BUMDes

2.2.7.1 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja Menurut Hasibuan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya atas kecakapan , usaha , dan kesempatan. Kinerja juga merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugasnya berdasarkan pengalaman dan ketekunan menurut standart dan kriteria yang ditentukan. kinerja dibedakan menjadi dua yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawanbaik dari kualitas maupun kuantitas berdasarkan standart kerja yang ditentukan. Dan untuk kinerja organisasi adalah penggabungan antara kinerja individu dan kinerja kelompok.

Kinerja juga merupakan tolak ukur seseorang untuk melaksanakan tugas – tugasnya agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai usaha atau proses yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya.

2.2.7.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2014) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kemampuan.

Setiap kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan dengan pendidikan yang sesuai standart untuk mengemban jabatan yang sesuai dengan kemampuannya untuk memudahkan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

2. Faktor Motivasi.

Motivasi dapat terbentuk dari sikap atau attitude seseorang dalam menghadapi situasi , motivasi dapat diartikan sebagai kondisi yang mengharuskan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2.7.3 Kinerja Badan Usaha Milik Desa

Kinerja ialah hasil dari usaha yang umumnya diukur dengan indikator keuangan dan non keuangan. Indikator

keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja seperti :

- a) peningkatan penjualan,
- b) peningkatan modal,
- c) peningkatan keuntungan,
- d) peningkatan asset dan ukuran

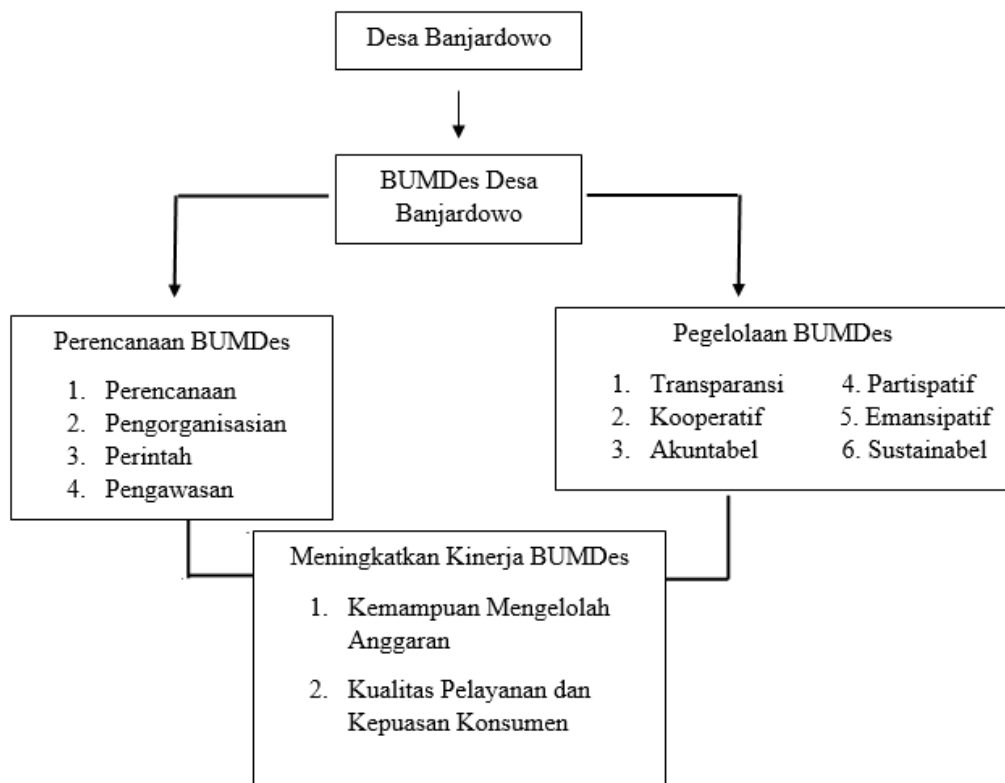
Indikator non keuangan seperti :

- a. kemampuan mengelola anggaran,
- b. kualitas pelayanan,
- c. kepuasan konsumen,
- d. peningkatan luas pasar. Kesuksesan dan berkembangnya BUMDes dalam melakukan tugas dan kewajibannya terletak pada pengurus BUMDes tersebut , meskipun dapat dikatakan bentuk usaha BUMDes yang sederhana dibandingkan lainnya tetapi pelaksanaan program BUMDes tidak sesederhana itu karena dalam proses pelaksanaannya pengurus BUMDes harus benar – benar memahami bagaimana keadaan potensi desa dan mereka harus delalu berinovasi untuk menghadapi setiap perubahan yang akan datang dengan tidak meninggalkan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan pengelolaan BUMDes

dapat dilihat dari faktor – faktor seperti sumber daya manusia , standart operasional prosedur , dan lain – lain.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran perencanaan dan pengelolaan keuangan BUMDes Desa Banjardowo Kecamatan Jombang dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 1